

## ABSTRAK

Dengan semakin majunya program kerja diantara Sekolah Menengah Kejuruan, diperlukan suatu pendelegasian wewenang dalam mengambil keputusan dari manajer di tingkat atas ke manajer yang berada di bawahnya. Pendelegasian wewenang harus disertai dengan sistem pengendalian, pengawasan, dan pengukuran kinerja manajemen yang mendapat limpahan wewenang serta koordinasi secara baik guna tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu, peranan akuntansi pertanggungjawaban pun semakin dibutuhkan sebagai alat untuk mengukur kinerja manajemen yang mendapat limpahan wewenang dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan hasil yang diharapkan atau yang telah ditetapkan.

Akuntansi pertanggungjawaban menuntut pembentukan pusat-pusat pertanggungjawaban pada keseluruhan organisasi dimana tiap manajer pusat pertanggungjawaban akan bertanggungjawab atas kegiatan yang terjadi dalam pusat yang dipimpinnya. Terdapat beberapa elemen yang harus dipenuhi dalam kaitannya dengan penerapan akuntansi pertanggungjawaban, yaitu struktur organisasi, proses penyusunan anggaran, sistem kodifikasi rekening, klasifikasi biaya terkendali dan tidak terkendali serta laporan pertanggungjawaban.

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pamekasan selama ini belum mengadakan laporan pertanggungjawaban untuk masing-masing pusat pertanggungjawaban. Selain itu, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pamekasan juga belum memasukkan kode organisasi dalam sistem pengkodean rekening dan tidak memisahkan biaya atas dasar keterkendiannya. Hal ini menyebabkan informasi akuntansi yang ada tidak dapat berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja kepala sekolah. Agar informasi tersebut dapat digunakan sebagai alat penilaian kinerja, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pamekasan harus menerapkan elemen-elemen akuntansi pertanggungjawaban sesuai konsep yang ada.